

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Laporan Hasil Penelitian, dan Makalah:

- Adi, Rianto, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arto, A. Mukti, 2001, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basuki, Sulistyono, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana – Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakhriah, Efa Laela, 2009, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Alumni, Bandung
- Fauzan, H.M., 2013, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1990, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Balai Pustaka, Bandung.
- _____, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

- Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mappong, H.A. Kadir, "Tentang Peninjauan Kembali", *Makalah*, Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.
- Mariyadi dan Afandi, 2008, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengemban Profesi Hukum)*, Visipress Media, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sihombing, Charles Barita Hamonangan, 2017, *Aspek Keadilan Terhadap Pembatasan Satu Kali Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Swantoro, Herri, 2017, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group, Depok.
- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwansyah “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni 2017.
- Utama, Nanda, 1994, Permohonan Peninjauan Kembali dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012.
2. Artikel Majalah/Koran
- Rosita, Dian, “Pentingkah Pembatasan Perkara?”, *Tempo*, 5-11 Juli 2010.
3. Internet
- Adriyana, Nurul, “MA Dinilai Membangkan Konstitusi”, <https://nasional.sindonews.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533>, diakses tanggal 30 September 2018.
- Mahkamah Agung, “Daftar Nama Ketua Kamar dan Hakim Agung Republik Indonesia”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/hakim-agung>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.
- Nasima, Imam, “Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Bagian 2)”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-broleh--imam-nasima->, diakses tanggal 30 September 2018.
- Paat, Yustinus, “Jimly Asshiddiqie: Tanpa Novum, PK Tidak Bisa Diulang”, <http://www.beritasatu.com/hukum/239520-jimly-asshiddiqie-tanpa-novum-pk-tidak-bisa-diulang.html>, diakses 30 September 2018.
- Saputra, Andi, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Krisna: SEMA Itu Jalan Keluar”, <https://news.detik.com/berita/2793412/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466>, diakses tanggal 30 September 2018.

_____, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Keluarnya SEMA”, <https://news.detik.com/berita/2792201/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj=>, diakses tanggal 30 September 2018.

Sukmana, Yoga, “Perkara Menumpuk, MA Minta Tambahan 8 Hakim Agung Lagi”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/15291831/perkara-menumpuk-ma-minta-tambahan-8-hakim-agung-lagi>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

Yasin, Muhammad, “Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>, diakses 27 Agustus 2018.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 PK/PDT/2016 perihal Peninjauan Kembali perkara Drs. Anak Agung Ngurah Oka dan Anak Agung Ngurah Gede Putra, 21 September 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/PDT/2011 perihal Peninjauan Kembali perkara I Dit, I Redit, dan I Rembon, 27 Juli 2011.